

GRADUASI MANDIRI KELURGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR

Ferizone ¹, Faizal Rianto ², Yanazh Febryanti ³, dan Dwiniati ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji

¹ Korespondensi Author e-mail: feri_zone@yahoo.co.id

Diterima : 10082023

Direvisi: 14092023

Disetujui: 17102023

ABSTRACT

One of the programs implemented by the Indonesian government to overcome poverty is the Family Hope Program (PKH). In Tanjungpinang Timur Sub-district since the implementation of PKH from 2013 to the present, there are several reasons for KPM's reluctance to make independent graduation, such as lack of awareness in managing finances and still being dependent on PKH assistance. However, in 2022 there were 48 KPM in Tanjungpinang Timur Sub-district who successfully graduated independently from PKH. This study aims to determine the factors that cause KPM PKH to make independent graduation in Tanjungpinang Timur Sub-district. This research adopts the findings of Armalid (2020) who divides the driving factors of independent graduation into internal factors and external factors. The research method is descriptive qualitative with an exploratory design. The sample amounted to 31 informants. Data collection techniques with interviews and observations. The research results obtained are internal factors and external factors. Internal factors that cause KPM to graduate independently are social care, self-awareness, feelings of shame and business motivation. External factors that cause KPM to graduate independently are family support, the Family Welfare Improvement Meeting (P2K2) and the lebelization policy. The conclusion of this study is that there are only 3 KPM who are able to manage family finances so that they make independent graduation as expected. Researchers recommend that KPM who are still and have graduated independently from PKH be able to manage family finances better and as needed, for PKH assistants to maximize P2K2 and for the Tanjungpinang City Social Service to always monitor the implementation of PKH in Tanjungpinang City.

Keywords: *poverty; family hope program; poverty alleviation; designated as beneficiary families; social policy; independent graduation.*

ABSTRAK

Salah satu program yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Di Kecamatan Tanjungpinang Timur sejak berjalannya PKH dari tahun 2013 hingga saat ini, terdapat beberapa alasan keengganan KPM dalam melakukan graduasi mandiri, seperti kurang sadar dalam mengatur keuangan dan masih ketergantungan dengan bantuan PKH. Namun, pada tahun 2022 terdapat 48 KPM di Kecamatan Tanjungpinang Timur yang berhasil melakukan graduasi mandiri dari PKH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan KPM PKH melakukan graduasi mandiri di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Penelitian ini mengadopsi temuan Armalid (2020) yang membagi faktor pendorong graduasi mandiri menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif dengan desain eksploratif. Sampel berjumlah 31 informan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan KPM graduasi mandiri adalah kepedulian sosial, kesadaran diri, perasaan malu dan motivasi usaha. Faktor eksternal yang menyebabkan KPM graduasi mandiri adalah dukungan keluarga, Pertemuan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (P2K2) dan kebijakan lebelisasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa hanya terdapat 3 KPM yang mampu mengelola keuangan keluarga sehingga melakukan graduasi mandiri sesuai dengan yang diharapkan. Peneliti merekomendasikan untuk KPM yang masih dan sudah melakukan graduasi mandiri dari PKH agar dapat mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik dan sesuai kebutuhan, untuk pendamping PKH agar memaksimalkan P2K2 dan untuk Dinas Sosial Kota Tanjungpinang agar selalu memonitoring pelaksanaan PKH di Kota Tanjungpinang.

Kata kunci: kemiskinan; penanggulangan kemiskinan; program keluarga harapan; keluarga penerima manfaat; kebijakan sosial; graduasi mandiri.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan kompleks di ranah sosial yang terus terjadi di negara berkembang dan negara maju sehingga menjadi fokus utama pemerintah dalam menjalankan pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat (Edu & Rohman, 2019). Secara harfiah, menurut Poerwadarminta kemiskinan berasal dari kata “miskin yang berarti tidak berharta benda”, sedangkan secara luas adalah keadaan tidak mampu individu, kelompok, ataupun keluarga sehingga keadaan ini akan memicu terjadinya permasalahan baru dalam kehidupan sosial. Sedangkan menurut Kuncoro kemiskinan adalah keadaan tidak mampu seorang untuk mencapai kebutuhan hidup standar (dalam Rustanto, 2015).

Kemiskinan juga dapat disebut sebagai kekurangan kesejahteraan yang nyata, dan masyarakat miskin dapat disebut sebagai mereka yang tidak mempunyai pendapatan atau konsumsi yang cukup untuk menempatkan mereka di atas ambang batas minimum yang memadai. Kemiskinan juga dapat dilihat dari segi moneter dan jenis konsumsi tertentu; misalnya, miskin rumah, miskin pangan, atau miskin kesehatan. Sementara itu, pendekatan yang paling luas terhadap kesejahteraan (dan kemiskinan) berfokus pada kemampuan individu untuk berfungsi dalam masyarakat. Masyarakat miskin sering kali tidak mempunyai kemampuan seperti: pendapatan atau pendidikan yang tidak memadai, atau memiliki kondisi kesehatan yang buruk, atau merasa tidak berdaya, atau tidak memiliki kebebasan politik (Haughton & Khandker, 2009).

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk sebesar 275,77 juta jiwa, memiliki penduduk sebesar 26,16 juta jiwa yang masih berada di ruang lingkup kemiskinan (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2022). Kemiskinan menjadi perhatian pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pembukaan UUD 1945 alenia ke-IV, dan terutama pada Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 pasal 34 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sejalan dengan hal tersebut, upaya penanganan kemiskinan di Indonesia, salah satunya dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai yang menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan

dasar. Maka dari itu, dalam mengimplementasi Perpres ini lembaga yang menangani adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan berbagai program sosial yang salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang diluncurkan pada tahun 2007, di dalam dunia Internasional disebut *Conditional Cash Transfer* (Rizaldi et al., 2021).

PKH sebagai program sosial pendukung ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 adalah program pemberi bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Tujuan dari pemberian bantuan PKH, sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PKH Non Tunai, ialah sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan membantu dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin, membentuk kemandirian perilaku KPM dalam mengakses layanan, meminimalisir kemiskinan, kesenjangan dan ketimpangan sosial, mensosialisasikan manfaat bantuan keuangan kepada KPM (Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan, 2020). Sementara itu, sasaran untuk KPM PKH, menurut Pedoman Pelaksanaan PKH, terbagi menjadi tiga kategori utama yaitu kategori kesehatan (terdiri dari ibu hamil dan anak usia dini 0-6 tahun), kategori pendidikan (terdiri dari anak usia sekolah 6-21 tahun), dan kategori kesejahteraan sosial (terdiri dari disabilitas berat dan lansia) (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021).

PKH sudah dilaksanakan oleh Kemensos sejak tahun 2007, namun, di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjungpinang, PKH baru dilaksanakan pada tahun 2013 melalui koordinator dan pendamping social oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) dalam membantu Dinas Sosial Kota Tanjungpinang. Berikut data KPM PKH Kota Tanjungpinang:

Tabel 1. Data KPM PKH Kota Tanjungpinang

Kecamatan	Jumlah KPM				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bukit Bestari	1138	1068	1065	1285	940
Tanjungpinang Barat	1250	1182	1117	1235	1224
Tanjungpinang Kota	845	810	786	894	872
Tanjungpinang Timur	2243	2148	2123	2234	2177
Jumlah Total	5476	5208	5091	5648	5221

Sumber: Pelaksana PKH (PPKH) – Dinsos Kota Tanjungpinang 2022

Dalam melaksanakan PKH, tentunya mempunyai alur atau tahapan yang dilewati agar pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan baik. Adapun alur dimulai dari perencanaan, yaitu untuk menentukan jumlah calon KPM yang ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial. Kedua, pertemuan awal dan validasi yaitu untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi terkait PKH kepada calon KPM yang disampaikan oleh pendamping PKH. Ketiga, penetapan KPM PKH yaitu penetapan berdasarkan validasi kesesuaian kriteria kepesertaan PKH yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Keempat, penyaluran bantuan yaitu berbentuk uang secara bertahap dalam satu tahun yang disalurkan dengan membuka rekening dan pencetakan buku tabungan, penarikan dana dengan layanan bank atau ATM. Kelima, pemutakhiran data yaitu dilakukan oleh pendamping PKH dengan tujuan untuk mengetahui keadaan terkini KPM serta memastikan seluruh KPM PKH terdaftar dan mendapatkan layanan dari fasilitas bantuan. Keenam, pendampingan yaitu dilakukan oleh pendamping PKH setelah bantuan tersalurkan melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dan terakhir transformasi kepesertaan yaitu sebagai proses pengakhiran KPM PKH melalui kegiatan resertifikasi (pendataan ulang) untuk menetapkan status akhir kepesertaan yaitu transisi dan graduasi sebagai yang diharapkan dari adanya PKH agar terjadi perubahan perilaku KPM.

Menurut Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH, graduasi adalah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan dan/atau meningkatnya suatu kondisi sosial ekonomi, yang dibuktikan melalui kegiatan pemutakhiran data (Kemensos, 2022). Definisi tersebut juga diperjelas dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 56, graduasi terdiri atas (2) jenis, yaitu: 1. Graduasi alamiah merupakan berakhirnya masa kepesertaan KPM PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan, dan 2. Graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi (mandiri) merupakan berakhirnya masa kepesertaan KPM PKH berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan salah satu pendamping PKH di Kecamatan Tanjungpinang Timur, peneliti mendapatkan bahwa dalam berjalannya PKH terdapat beberapa alasan keengganan KPM dalam melakukan graduasi mandiri. KPM PKH umumnya menunjukkan sikap kurang sadar dalam mengatur keuangan, sikap cuek dan santai dalam menghadiri P2K2 yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Disamping itu, alasan-alasan seperti masih harus menerima bantuan PKH karena masih masuk dalam kategori PKH, serta

merasa ketergantungan dengan bantuan yang didapat dari PKH. Namun, pada tahun 2022 di Kota Tanjungpinang didapatkan data KPM PKH yang melakukan graduasi mandiri:

Tabel 2. Data KPM PKH yang Melakukan Graduasi Mandiri Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Graduasi (KPM)
Bukit Bestari	5 KPM
Tanjungpinang Barat	11 KPM
Tanjungpinang Timur	48 KPM
Tanjungpinang Kota	6 KPM
Total	70 KPM

Sumber: Pelaksana PKH (UPPKH) – Dinsos Kota Tanjungpinang, 2022

Berdasarkan Tabel 2, peneliti mencatat bahwa di Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki jumlah KPM yang melakukan graduasi mandiri jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan penelitian: apa faktor-faktor yang menyebabkan KPM PKH melakukan graduasi mandiri di Kecamatan Tanjungpinang Timur? Pertanyaan ini juga muncul karena bercermin pada penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mendorong dan mempengaruhi KPM PKH dalam melakukan graduasi mandiri, seperti yang dilakukan oleh Armalid et al., (2020), Kusumaningrum et al., (2020), Gumbira et al., (2022), Indrasawarni & Darma (2023) dan Riztiana & Handoyo (2021). Selain itu, penelitian tentang faktor-faktor penentu yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan PKH, tingkat keberdayaan KPM, tingkat graduasi mandiri KPM, serta dampak program PKH, juga melandasi penelitian ini (Khoiriyah & Kunarti, 2019; Shintia et al., 2022; Wediawati et al., 2021; Sulfadli et al., 2023). Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara, kesenjangan jumlah KPM PKH antar kecamatan yang melakukan graduasi, serta bercermin pada penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap KPM yang melakukan graduasi mandiri di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.

METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor penyebab graduasi mandiri KPM PKH di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Pendekatan penelitian mengadopsi hasil temuan (Armalid et al., 2020) yang mengkategorikan faktor-faktor pendorong graduasi mandiri KPM PKH kedalam dua (2) kelompok faktor sebagai berikut: a. Faktor internal, adalah faktor yang lebih menunjukkan keadaan yang dirasakan dari dalam diri KPM PKH di Kecamatan Tanjungpinang Timur sehingga mempengaruhinya untuk melakukan graduasi

mandiri, dan b. Faktor eksternal, adalah faktor yang lebih menunjukkan keadaan yang didorong dari lingkungan atau orang lain diluar diri KPM PKH di Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam melakukan graduasi mandiri.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan desain eksploratif. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin hingga peneliti menemukan jawaban yang diharapkan dari informan. Penelitian deskriptif adalah usaha untuk menjelaskan, mencatat dan menganalisa suatu kondisi. Sementara itu, penelitian eksploratif merupakan suatu penelitian yang masih bersifat terbuka, karena masih menggali informasi dan belum memiliki hipotesa, sehingga penelitian eksploratif digunakan dalam penelitian deskriptif sebagai tahap awal sehingga masalah penelitian dapat dirumuskan lebih jelas dan rinci (Pasolong, 2016). Kecamatan Tanjungpinang Timur dipilih menjadi lokasi penelitian karena Kecamatan Tanjungpinang Timur merupakan kecamatan yang memiliki jumlah KPM PKH terbanyak dalam melakukan graduasi mandiri di tahun 2022 di Kota Tanjungpinang, yaitu berjumlah 48 KPM.

Populasi pada penelitian ini adalah 1 orang coordinator PPKH, 10 orang pendamping sosial PKH dan 48 orang KPM PKH yang sudah melakukan graduasi mandiri. Berdasarkan populasi tersebut, penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Rincian sampel penelitian adalah: 1 orang Koordinator PPKH Kota Tanjungpinang, 5 orang pendamping PKH Kecamatan Tanjungpinang Timur (telah menjadi pendamping minimal satu tahun dan memiliki dampingan keluarga yang sudah graduasi mandiri dari PKH). Sementara KPM PKH yang bersedia diwawancarai adalah 25 orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam yang tidak terstruktur dan menggunakan pedoman wawancara. Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada KPM yang sudah melakukan graduasi mandiri berupa: kapan KPM mulai mendapatkan bantuan PKH, apa saja komponen yang di dapatkan KPM dan mengapa KPM memutuskan untuk melakukan graduasi mandiri. Kemudian untuk pendamping sosial PKH peneliti mengajukan pertanyaan berupa: apa saja dorongan pendamping dalam mendorong KPM PKH melakukan graduasi mandiri, apa yang melatarbelakangi KPM PKH dampingan pendamping dalam melakukan graduasi mandiri dan bagaimana kehidupan KPM yang sudah melakukan graduasi mandiri. Pertanyaan yang di ajukan ke pendamping sosial PKH bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang faktor penyebab graduasi mandiri KPM PKH yang tidak dapat dilihat dari sudut pandang KPM tersebut. Peneliti juga melakukan observasi ke rumah KPM

yang sudah melakukan graduasi mandiri guna melihat secara langsung keadaan setelah KPM tersebut melakukan graduasi mandiri dengan membuat catatan observasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif yaitu reduksi data yang digunakan peneliti setelah mencari data dilapangan dengan wawancara terkait alasan-alasan KPM PKH melakukan graduasi mandiri, kemudian peneliti rangkum dan membuat tema atau kata kunci. Kedua, penyajian data yang digunakan ketika proses reduksi data selesai, karena peneliti akan analisis tema atau kata kunci tersebut untuk dikelompokkan kedalam faktor-faktor sesuai dengan konsep operasional yang digunakan. Dan terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan ketika semua data yang sudah terkumpul dan dikelompokkan berupa faktor penyebab graduasi mandiri KPM PKH akan peneliti tarik kesimpulan dan berikan saran (Sugiyono, 2021).

PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan wawancara terhadap informan menghasilkan temuan yaitu: faktor internal dan faktor eksternal dalam graduasi secara mandiri KPM PKH. Temuan ini dihasilkan dari wawancara kepada 1 orang koordinator PPKH, 5 orang pendamping sosial PKH dan 25 KPM PKH yang telah melakukan graduasi mandiri. Faktor internal adalah faktor yang lebih menunjukkan keadaan yang dirasakan dari dalam diri KPM PKH di Kecamatan Tanjungpinang Timur sehingga mempengaruhinya untuk melakukan graduasi mandiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang lebih menunjukkan keadaan yang didorong dari lingkungan atau orang lain diluar diri KPM PKH di Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam melakukan graduasi mandiri. Untuk lebih jelasnya faktor internal dan faktor eksternal yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.3. Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Faktor Internal	Faktor Eksternal
Kepedulian Sosial	Dukungan Keluarga
Kesadaran Diri	Kegiatan P2K2
Perasaan Malu	Kebijakan Lebelisasi
Motivasi Usaha	

Sumber: data olahan peneliti, 2023

Faktor Internal

Dari hasil wawancara dengan KPM PKH yang sudah melakukan graduasi mandiri, ditemukan empat faktor yang mendorong KPM tersebut, yakni: kepedulian sosial, kesadaran diri, perasaan malu, dan motivasi usaha.

a. Kepedulian Sosial

Kepedulian sosial merupakan kemampuan seseorang dalam mengamati lingkungan sekitar dan perubahan yang terjadi terhadap orang lain. Kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat mencerminkan sikap peduli terhadap hak dan kesejahteraan orang lain yang dapat menjadikan hubungan antar individu lebih akrab, karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan berhubungan. Sikap peduli sosial dibentuk dari kepribadian yang matang dan pola pikir yang berkualitas.

Kepedulian sosial menjadi salah satu faktor yang membuat KPM PKH melakukan graduasi mandiri. Dalam hal ini kepedulian sosial merujuk pada ungkapan informan terkait kondisi lingkungan sosial yang menyadarkan mereka bahwa masih banyak keluarga atau tetangga-tetangga disekitar yang lebih membutuhkan dan berhak menerima bantuan PKH. Kesadaran tersebut membuat mereka membandingkan lingkungan sekitar dengan kelayakan hidup mereka yang masih tetap menerima bantuan PKH padahal ekonomi sudah cukup membaik untuk saat ini.

Ibu FA (34) merupakan KPM yang menerima PKH pada tahun 2018. Sebelum menerima PKH, ekonomi keluarga ibu FA memang sedang terpuruk. Ditambah lagi saat itu ibu FA sangat membutuhkan biaya yang cukup besar untuk persalinan anak ke-2 nya. Melihat kondisi keluarga ibu FA yang demikian, pak RT yang menjabat masa itu berinisiatif mendaftarkan keluarga ibu FA. Sehingga ibu FA mendapatkan bantuan PKH dengan komponen anak usia 0-6 tahun dan anak SD. Bantuan PKH memang sangat membantu keluarga ibu FA meskipun cair secara bertahap. Namun sekarang, ekonomi keluarga ibu FA sudah membaik. Suaminya bekerja di proyek bangunan dengan penghasilan yang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kepedulian sosial Ibu FA termotivasi dari kepedulian RT terhadap keluarganya. Tidak hanya itu, kepedulian sosial ibu FA juga timbul karena melihat banyak keluarga lain yang kehidupannya sama seperti keluarga ibu FA beberapa tahun silam. Hal ini membuat ibu FA termotivasi untuk melakukan graduasi mandiri dengan harapan bantuan PKH tersalurkan kepada keluarga yang benar-benar layak menerima, seperti yang di ungkapkan ibu FA berikut.

“Kalau kita ada rezeki lebih apa salahnya kita keluar, mana tau dengan keluar yang lebih layak lagi mendapatkan ini dan terbantu, kalau kita terus yang ambil dengan rezeki yang sudah Alhamdulillah, kayaknya serakah kali tidak mau berbagi dengan yang lain” (wawancara, 11 Maret 2023).

Sejalan dengan ungkapan ibu FA, ibu S (43) juga menerima PKH pada tahun 2018. Keluarga ibu S mendapat bantuan PKH dengan komponen anak SLTP dan diperpanjang hingga anaknya SLTA. Ibu S merasa terbantu dengan nilai manfaat dari komponen bantuan yang didapatkan selama menjadi KPM PKH. Berhubung pada tahun 2022 anaknya lulus SLTA, ibu S memutuskan untuk graduasi mandiri karena sadar anaknya sudah tidak termasuk dalam komponen dan tidak berhak menerima nilai manfaat bantuan PKH lagi. Ibu S juga peduli terhadap anak-anak dari keluarga lain yang tidak bersekolah karena terhalang biaya, di ungkapkan dalam ungkapan ibu S berikut:

“Saya bersyukurlah akan hal ini, emang kemarin nerima bantuan ini dengan kondisi yang emang lagi susah-susahnya, saya melihat masih banyak yang kehidupnya dibawah saya kan, jadi biarlah pemerintah memberikan kepada mereka yang kehidupannya dibawah saya” (wawancara, 21 Maret 2023).

Dari ungkapan yang disampaikan oleh beberapa KPM diatas, dan hasil observasi di lapangan. Peneliti dapat menyimpulkan bawah KPM yang telah melakukan graduasi mandiri memiliki sikap kepedulian sosial terhadap kehidupan keluarga lain. Tidak hanya itu, KPM juga sudah mampu menilai kelayakan kehidupan keluarga mereka dalam menerima bantuan dan membandingkannya dengan kehidupan keluarga lain.

b. Kesadaran Diri

Kesadaran diri merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memahami situasi, perasaan, pikiran serta penilaian terhadap diri. Seseorang yang memiliki kesadaran diri yang baik dapat memahami situasi sosial, memahami situasi orang lain guna untuk memudahkan dalam mengamati lingkungan sekitar. Kesadaran diri juga menjadi alasan KPM melakukan graduasi mandiri. Kesadaran diri yang dimaksud dalam hal ini yaitu adanya pengendalian emosional sehingga timbulnya rasa sadar dari dalam diri KPM sehingga merasa keluarganya sudah tidak layak untuk menerima bantuan PKH.

Ibu N (34) menjadi KPM PKH pada Juli 2022. Ibu N yang memiliki usaha toko kelontong dan suami yang bekerja sebagai pelaut, tidak menyangka dengan kondisi ekonominya yang seperti itu mendapat bantuan PKH. Ketika mendengar hal itu, ibu N tetap menerima pencairan uang bantuan tersebut, tetapi memberikannya kepada keluarga lain dan bahkan ibu N ingin mengalihkan namanya sebagai KPM kepada keluarga lain. Namun,

tindakan ibu N tidak bisa diwujudkan. Pendamping menyatakan bahwa meskipun bantuan ibu N yang cair diberikan kepada keluarga lain, lebih baik ibu N melakukan graduasi mandiri untuk menghindari resiko terkena sanksi jika suatu hari petugas dari Dinas Sosial survey langsung ke lapangan. Ungkapan Ibu N:

“Tahun kemarin itu nama saya terdata, saya langsung saja mau mengalihkan nama saya dengan tetangga saya, namun kata pendamping tidak bisa, ya terpaksa saya menerima uang itu dan langsung saya berikan kepada tetangga dengan kesaksian pendamping. Setelah itu barulah saya mengajukan pernyataan pengunduran diri. Ya sadar saja dengan kondisi kami yang sudah punya toko kelontong ini kami merasa tidak layak menerima, kan pemerintah menyalurkan bantuan itu untuk keluarga yang sangat membutuhkan bukan seperti keluarga kami ini” (wawancara, 20 Maret 2023).

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu N, dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan PKH itu terjadi kecolongan data pada sistem Kementerian Sosial. Hal seperti inilah yang selalu di anggap masyarakat sebagai bentuk ketidak tepat sasaran dalam implementasi bantuan PKH.

c. Perasaan Malu

Perasaan malu juga menjadi alasan dari dalam diri KPM PKH yang mendorong untuk melakukan graduasi mandiri. Perasaan malu ini muncul dari adanya penilaian keluarga lain terhadap kondisi KPM PKH dan perasaan malu KPM muncul karena adanya kehidupan keluarga lain yang lebih layak menerima bantuan PKH.

Ibu Y (38) baru menerima PKH pada tahap ketiga tahun 2022, mendapatkan komponen bantuan anak SLTA. Ibu Y tetap mengambil dan menggunakan bantuan tersebut meskipun anaknya sudah lulus SLTA. Hidup bersosialisasi dalam masyarakat membuat ibu Y mendengarkan kabar angin, bahwa untuk KPM PKH yang berusia dibawah 40 tahun sudah tidak boleh menerima bantuan PKH. Di sisi lain, ibu Y malu karena sudah menggunakan uang bantuan pada tahap ketiga, ditambah lagi keluarga ibu Y telah memiliki material berupa mobil. Adanya kepemilikan material seperti mobil, dalam penilaian keluarga lain bukanlah sebuah keluarga yang layak untuk menerima bantuan PKH, sehingga ibu Y memutuskan untuk graduasi mandiri. Berikut ungkapan ibu Y :

“Kebetulan nama saya terdata pada tahap pertama tahun 2022 komoponen anak SMA, kan anak saya sudah tamat SMA tahun 2021 dan pada tahap ketiga kemarin katanya umur dibawah 40 tahun tidak dapat lagi. Jadi, saya juga merasa serakah kali kemarin menerima bantuan itu. Lagipun malu juga sama mulut tetangga dengan kami yang sudah ada mobil sedan ini tapi menerima PKH. Terus mikir juga nanti kalau ada pendataan dari dinas ketahuan kami ada mobil kan” (wawancara, 21 Maret 2023).

Perasaan malu yang berbeda di rasakan oleh Ibu UM (47). Ibu UM menjadi menerima PKH sejak tahun 2016 dengan komponen anak SLTP. Keluarga ibu UM menempati rumah pribadi yang sederhana. Pekerjaan suami ibu UM sebagai buruh di pasar Tanjungpinang dan ibu UM sebagai IRT yang juga mencari uang sampingan sebagai pengupas bawang. Keluarga ibu UM bersyukur atas bantuan PKH yang selama ini keluarganya terima karena sangat membantu perekonomian keluarga. Dari awal ibu UM menjadi KPM hingga pertengahan tahun 2021, pencairan bantuan PKH berjalan dengan lancar dan tepat waktu dalam setiap tahapannya. Namun, nasibnya berbeda dengan KPM yang lain, dimana pada awal tahun 2022 bantuan PKH ibu UM tidak kunjung cair. Di setiap tahapan jadwal pencairan yang dikabarkan oleh pendamping, selalu ibu UM cek ke ATM, namun tidak membuahkan hasil. Sehingga hal tersebut membuat Ibu UM merasa malu karena terus-terusan mengejar bantuan. Sehingga ibu UM memutuskan untuk graduasi mandiri dengan harapan semoga di masa yang akan datang kehidupan keluarganya dilancarkan rezeki. Seperti ungkapan ibu UM berikut ini :

“PKH saya sudah lama tidak keluar dalam waktu 1 tahun belakangan ini, ya saya malu lah sering bertanya ke pendamping dan saya juga malu di tanya sesama kawan penerima PKH terkait uang PKH, padahal saya sering kesana gosok-gosok ATM tetapi masih kosong” (wawancara, 09 Maret 2023).

Ibu UM memiliki perasaan malu yang tidak tertahan lagi, karena dalam waktu setahun belakangan ini setiap info jadwal pencairan yang didapatkan, ibu UM selalu pergi ke ATM untuk melakukan pengecekan, namun bantuannya tidak kunjung cair dan membuatnya memutuskan untuk melakukan graduasi mandiri.

d. Motivasi Usaha

Motivasi usaha adalah kondisi dari dalam diri seseorang yang menggerakkan jiwa dan pikirannya untuk memulai suatu usaha. Dalam implementasi bantuan PKH, terdapat KPM yang melakukan graduasi mandiri karena termotivasi dari usaha yang sudah dimiliki. Motivasi usaha yang dimaksud adalah kepemilikan usaha KPM yang baru dirintis, sudah mulai berkembang, sehingga adanya usaha membuat KPM dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan ingin hidup lebih mandiri tanpa campur tangan bantuan dari pemerintah. Namun, tidak banyak KPM yang selama mendapatkan bantuan PKH menggunakannya sebagai modal usaha, apalagi memutuskan untuk graduasi mandiri dengan alasan ingin lebih mandiri dari usaha yang sudah ada.

KPM PKH atas nama Ibu F (47), sudah mempunyai usaha kecil catering kue jauh sebelum ia menerima PKH pada tahun 2021. Ibu F menerima bantuan PKH karena mertuanya yang sudah lansia masuk dalam KK ibu F. Saat itu, mertuanya sakit parah sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membeli keperluan seperti pampers, susu dll. Keluarga ibu F menerima PKH komponen lansia karena sangat membutuhkan bantuan tersebut lantaran suaminya yang bekerja sebagai cleaning service dirumahkan sementara pada saat pandemi COVID-19.

Setelah berjalan selama 1 tahun, ibu F melihat kondisi mertuanya yang sudah semakin parah dan tidak memiliki harapan untuk sembuh. Membuat ibu F berniat jika nanti mertuanya sudah tidak ada dan keadaan juga sudah kembali normal, maka ia akan melakukan graduasi mandiri. Ternyata beberapa bulan dari terucapnya niat ibu F, mertuanya pun meninggal dunia. Selang sebulan setelah mertuanya meninggal, ibu F langsung mengajukan graduasi mandiri kepada pendamping.

Tidak hanya itu, alasan ibu F memutuskan untuk graduasi mandiri juga karena di pertengahan tahun 2022, ibu F sangat bersyukur karena mendapatkan bantuan UMKM dari Walikota Tanjungpinang. Berikut ungkapan ibu F:

“Komponen lansia sudah tidak termasuk lagi, lagipun saya sudah merasa cukup, untuk saat ini orderan kue meningkat, kemaren juga saya mendapat bantuan UMKM yang 5 jt itu dari Bu Rahma makanya saya keluar, mau lebih mandiri aja” (wawancara, 16 Maret 2023).

Seperti yang dikatakan ibu F, keputusan graduasi mandiri yang dilakukannya karena sudah tidak termasuk komponen penerima manfaat bantuan PKH dan juga disertai dengan semangat ibu F dalam menjalankan usaha catering. Modal bantuan UMKM yang ibu F dapatkan membuat ia merasa cukup dan terus ingin berusaha, karena ibu F memiliki prinsip hidup yang tidak ingin terus menerus miskin, apalagi bergantung dengan selalu menerima bantuan pemerintah.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang lebih menunjukkan keadaan yang didorong dari lingkungan atau orang lain diluar diri KPM PKH di Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam melakukan graduasi mandiri.

a. Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga menjadi salah satu faktor KPM graduasi mandiri. KPM mendapatkan pengaruh dari anggota keluarga yang berupa dukungan, motivasi atau bahkan perintah. Suami

sebagai kepala keluarga meyakinkan anggota keluarga bahwa dengan graduasi mandiri dari PKH, keluarga masih bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ibu M (39) menerima PKH pada tahun 2013. Menerima PKH dengan komponen anak SD. Ketika menerima PKH, keluarga ibu M hidup dan tinggal bersama orang tuanya. Ibu M merasa cukup dengan penghasilan suami Rp.900.000 perbulan dan bantuan PKH tetap diterimanya hanya untuk keperluan anak sekolah. Hal ini karena kebutuhan sehari-hari keluarganya tidak diperhitungkan oleh orang tuanya, meskipun sudah berumah tangga.

Setelah bertahun-tahun, suami ibu M ingin kehidupannya berubah, membuat suaminya mencari pekerjaan yang penghasilannya lebih tinggi dari pekerjaan sebelumnya. Tetapi keinginan tersebut baru terwujud dalam 2 tahun belakangan ini. Suami ibu M mendapatkan pekerjaan baru sebagai supir lori box dengan penghasilan Rp.2.500.000 perbulan. Sehingga suami Ibu M memerintahkannya untuk graduasi mandiri dari PKH, dalam ungkapan ibu M berikut ini:

“Suami suruh keluar, karena kata suami penghasilan sudah tinggi juga walaupun kerja supir lori box cukuplah untuk memenuhi kebutuhan hidup, saya mah nurut aja kata suami” (wawancara, 11 Maret 2023).

Melihat dari kedua pernyataan diatas, dapat di simpulkan bahwa graduasi mandiri KPM tidak akan terjadi jika suami atau anggota keluarga tidak mempengaruhi dan memberi keyakinan terhadap ibu-ibu sebagai pengelola keuangan. Sehingga, dengan adanya pengaruh tersebut membuat ibu-ibu sulit mengambil keputusan untuk menentukan status kepesertaan PKH.

b. Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan kegiatan pertemuan bulanan yang rutin diselenggarakan pendamping kepada KPM. Kegiatan P2K2 mewajibkan KPM untuk hadir dalam pertemuan sebagai bentuk komitmen atas kepesertaan sebagai penerima PKH. Kegiatan P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman dalam pengelolaan keuangan bagi keluarga. Kegiatan P2K2 disampaikan oleh pendamping dalam bentuk materi-materi pengajaran di setiap bulannya.

Ibu S (49) termasuk KPM PKH yang melakukan graduasi mandiri dikarenakan pada saat itu orang Dinas Sosial datang kerumah ibu S untuk survey lapangan. Dari pandangan orang Dinas Sosial terhadap kondisi fisik rumah ibu S, membuat orang Dinas Sosial menyatakan kepada ibu S, bahwa KPM yang sudah menempati rumah bagus sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk menerima bantuan PKH. Padahal, rumah yang ditempati ibu S adalah rumah

peninggalan orang tua. Jika dinilai dari pendapatan keluarganya, keluarga ibu S hidup dari hasil jualan sarapan pagi didepan rumah, ditambah lagi sekarang suaminya tidak memiliki pekerjaan. Ibu S masih sangat terbantu dengan bantuan PKH yang didapatkannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah SLTP anaknya. Namun, ibu S memutuskan graduasi mandiri, karena orang dinas sudah mengatakan hal demikian, seperti dalam ungkapan ibu S berikut :

“Saya belum mau keluar karena masih ada komponen, tetapi orang dinas datang dan bilang rumah sudah besar padahal saya menempati rumah orangtua, sering dibilang begitu mau tidak mau saya tanda tangan surat pernyataan” (wawancara, 08 Maret 2023).

Dari pernyataan yang di sampaikan diatas, KPM melakukan graduasi mandiri bukan karena mengimplementasikan materi kegiatan P2K2 yang disampaikan. Dan KPM graduasi mandiri bukan juga merasa sudah mampu secara ekonomi, melainkan karena merasa tertekan, sehingga membuat mereka melakukan graduasi mandiri.

c. Kebijakan Labelisasi

Kebijakan lebelisasi merupakan kebijakan yang di implementasikan di Kota Tanjungpinang pada Oktober 2022. Implementasi kebijakan lebelisasi menjadi upaya agar bantuan PKH yang diberikan tepat sasaran. Kemudian, tujuan lainnya untuk memudahkan stakeholder dalam bertugas meninjau KPM dan juga memudahkan masyarakat untuk menilai serta melaporkan kelayakan penyaluran bantuan PKH.

Sebelum pelebelan di implementasikan disetiap rumah KPM, pendamping PKH disetiap kelurahan harus memberikan sosialisasi. Sosialisasi terkait kesiapan KPM jika masih ingin tetap mendapat bantuan PKH harus siap rumahnya diberi label keluarga miskin. Dari adanya sosialisasi kebijakan lebelisasi, KPM dihadapkan dengan dua (2) pilihan, yaitu tetap menerima PKH namun dengan rumah yang harus dilebel atau melakukan graduasi mandiri tetapi tidak lagi menerima PKH.

Ungkapan ibu B (34), awalnya menerima BPNT kemudian menjadi KPM PKH pada tahun 2018. Ibu B menerima PKH dengan komponen anak SD, merasa terbantu karena dengan pendapatan suaminya yang tidak tetap sebagai karyawan dealer. Ibu B dengan sangat terpaksa harus graduasi mandiri dari PKH disebabkan oleh kebijakan labelisasi ini. Kebijakan labelisasi menjadi alasan ibu B karena rumah yang ditempatinya saat ini adalah rumah iparnya, dimana iparnya tidak mengizinkan rumah tersebut untuk diberi label sebagai keluarga miskin. Ungkapan ibu B, adalah sebagai berikut:

“Saya keluar dari PKH karena ada lebelisasi, inikan saya menempati rumah ipar saya, mau tidak mau saya harus keluar padahal saya masih butuh sekali dengan bantuan ini” (wawancara, 11 Maret 2023).

Di sisi lain, kebijakan lebelisasi menimbulkan perasaan malu anak-anak. Ibu A (48) sebagai IRT dan suaminya yang bekerja sebagai bengkel tralis, masih belum merasa cukup dengan penghasilan suami. Namun, ibu A harus melakukan graduasi mandiri karena anaknya malu jika rumahnya akan dilabel sebagai keluarga miskin. Padahal, dari hasil observasi lapangan, kondisi rumah ibu A sudah sangat bagus dan jika merujuk pada kriteria kemiskinan, keluarga ibu A dapat dikatakan sudah tidak termasuk dalam kriteria sebagai penerima PKH. Dituangkan dalam ungkapan ibu A, sebagai berikut:

“Sebenarnya saya belum mau keluar, tetapi anak saya dengar ada lebelisasi dia tidak mau rumah ini di cap, terpaksa saya keluar” (wawancara, 16 Maret 2023).

Kebijakan lebelisasi ini sebenarnya berhasil untuk menyadarkan KPM PKH yang termasuk kategori mampu tetapi masih selalu menerima bantuan. Namun, di sisi lain terdapat KPM PKH yang terbilang belum mampu namun tidak mau jika rumahnya diberi di lebelisasi, sehingga KPM memutuskan untuk graduasi mandiri.

KESIMPULAN

Untuk faktor internal, peneliti menemukan empat (4) alasan KPM memutuskan untuk graduasi mandiri. Pertama, kepedulian sosial yang merujuk pada ungkapan KPM terkait kondisi lingkungan keluarga lain yang taraf kehidupannya berada dibawah KPM. Kemudian, kepedulian sosial terhadap keluarga lain yang sering mendaftar untuk mendapatkan bantuan PKH namun sampai saat ini tidak kunjung menerima. Kedua, kesadaran diri ditunjukkan KPM karena ekonomi dan penghasilan keluarganya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, perasaan malu muncul dalam diri KPM ketika kondisi mereka di nilai mampu oleh keluarga lain. Namun tidak hanya itu, dari observasi di lapangan peneliti mendapatkan perasaan malu KPM muncul ketika jadwal pencairan bantuan PKH yang tersalurkan secara bertahap ini, nama KPM tidak lagi muncul tanpa KPM tersebut mengetahui sebab dan akibatnya. Keempat adalah motivasi usaha yaitu adanya usaha yang sedang dan sudah dirintis oleh KPM membuat mereka ingin lebih mandiri atau dapat dikatakan KPM ingin hidup tanpa campur tangan bantuan pemerintah lagi.

Faktor eksternal yang dikelompokkan peneliti, menemukan tiga (3) alasan KPM melakukan graduasi mandiri. Pertama, adalah dukungan keluarga. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa graduasi mandiri yang dilakukan KPM mayoritas karena dorongan

suami. Kedua adalah kegiatan P2K2 yang merupakan kegiatan rutin antara pendamping dan KPM. Adanya kegiatan rutin ini, KPM diwajibkan hadir untuk selalu mendapatkan arahan, masukan dan menyadarkan KPM untuk memberikan kesempatan terhadap keluarga lain yang lebih membutuhkan. Dan yang terakhir adalah kebijakan lebelisasi. KPM umumnya tidak ingin rumahnya diberi label sebagai KPM PKH. Namun, terdapat juga KPM yang memutuskan graduasi mandiri karena adanya implementasi kebijakan lebelisasi ini.

Graduasi mandiri yang merupakan tahapan akhir kepesertaan KPM PKH yang juga merupakan tujuan akhir atau harapan dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Dari hasil penelitian saya untuk menemukan faktor-faktor penyebab graduasi mandiri KPM PKH di Kecamatan Tanjungpinang Timur masih terbilang graduasi mandiri belum maksimal. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa graduasi mandiri yang sesungguhnya adalah ketika KPM yang mengajukan pengunduran diri dari kepesertaan ketika ekonomi KPM tersebut benar-benar sudah meningkat. Namun, kenyataan yang dijumpai di lapangan, hanya terdapat tiga (3) KPM yang graduasi mandiri karena mampu mengelola keuangan keluarga menjadi sebuah usaha.

Adapun rekomendasi saran yang peneliti sampaikan, pertama yaitu untuk KPM yang saat ini masih menerima bantuan PKH, agar dapat mengelola keuangan keluarga menjadi lebih baik lagi, supaya perekonomian keluarga memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga, dapat melakukan graduasi mandiri, guna memberikan kesempatan kepada keluarga lain agar dapat menerima bantuan PKH. Selanjutnya rekomendasi saran untuk KPM yang sudah melakukan graduasi mandiri, untuk lebih memperhatikan keuangan keluarga agar sesuai kebutuhan. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menerapkan materi-materi yang didapat selama menjadi KPM PKH dalam kegiatan P2K2, karena tujuan dari materi tersebut untuk merubah perilaku kehidupan keluarga. Selanjutnya saran untuk pendamping sosial, supaya lebih meningkatkan interaksi kepada KPM, lebih memaksimalkan kegiatan P2K2 yang sudah di arahkan dari Kemensos, dan pendamping harus lebih kreatif dalam merubah pola pikir KPM agar target dan tujuan pendamping sosial terkait graduasi mandiri tercapai tepat waktu.

Rekomendasi saran juga diberikan kepada pemerintah Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, untuk lebih memonitoring pelaksanaan PKH di Kota Tanjungpinang. Karena masih banyak KPM PKH yang sudah lama mendapatkan bantuan PKH tetapi tidak kunjung sejahtera, dan tidak melakukan graduasi mandiri, bisa jadi disebabkan oleh dampingan yang diberikan

pendamping selama ini tidak dirasakan KPM, atau karena KPM sudah tidak dapat mengembangkan diri dan masih bergantung pada bantuan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Armalid, I. I., Purboningsih, E. R., Widiastuti, T. R., & Ninin, R. H. (2020). Studi Eksplorasi: Analisis Faktor Pendorong Ibu dari Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Mandiri. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 19(3), 209–220.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2022). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2020-2022*.
- Edu, E., & Rohman, A. (2019). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu*. 8, 67. www.publikasi.unitri.ac.id
- Gumbira, H., Agiati, R. E., & Indrakentjana, B. (2022). Respon Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan terhadap Program Graduasi Mandiri di Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 4(2), 157–177.
- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*. The World Bank.
- Indrasawarni, N. L. P. M., & Darma, G. D. (2023). Modal Sosial dalam Graduasi Sejahtera Mandiri Program Keluarga Harapan di Provinsi Bali. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 10(1), 35–68.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*.
- Khoiriyah, N., & Kunarti. (2019). Graduasi Mandiri: Bentuk Keberdayaan Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 143–156. <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan>,
- Kusumaningrum, R., Nugroho, F., & Alfrojems. (2020). Faktor-Faktor Keberhasilan Keluarga Penerima Manfaat Faktor-Faktor Keberhasilan Keluarga Penerima Manfaat untuk Mencapai Graduasi dari Program Keluarga Harapan. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 19(3), 265–275. <https://www.kemsos.go.id/kpm-pkh->
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan, (2020).
- Pasolong, H. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Rizaldi, A. Y., Nur, A. D. P., & Nazaki. (2021). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 171–180.
- Riztiana, L., & Handoyo, P. (2021). Rasionalitas Graduasi Mandiri Sebagai Penerima PKH di Desa Babadan, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Paradigma*, 10(1).
- Rustanto, B. (2015). *Menangani Kemiskinan*. Remaja Rosdakarya.
- Shintia, Suwitri, S., & Wismaningtyas, T. A. (2022). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Baledono, Kabupaten Purworejo. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 6(2), 1–9.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (3rd ed.). Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Wediawati, B., Jamal, Machpuddin, A., Ratnawati, R., & Syarif, A. (2021). Efektifitas Skema Graduasi Program Keluarga Harapan: Studi Pada Keluarga Penerima Manfaat di Kota Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(1), 57–68.
<https://doi.org/10.53867/jea.v1i1.13>